

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan pendidikan terus menjadi masalah yang sangat memprihatinkan di Indonesia, terlebih lagi ketika berbicara mengenai pemerataan pendidikan di daerah-daerah pelosok, dimana hal tersebut membuat adanya perbedaan kualitas antara di daerah perkotaan & pedesaan. Dengan itu, pemerintah memiliki berbagai upaya guna mengatasi masalah tersebut, yakni dengan menggunakan jalur domisili pada proses SPMB, jalur domisili memiliki tujuan guna mempermudah para calon siswa/i yang ingin bersekolah di sekolah yang dituju, dalam artian hal ini juga dapat menghapus julukan sekolah favorit & sekolah yang kurang di kalangan masyarakat.

Disamping itu, hal tersebut dituangkan oleh pemerintah dalam Penerapan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, dimana hal ini berbicara terkait dengan PPDB di kalangan TK, SD, SMP, SMA, & SMK. Lalu, pemerintah juga menuangkan terkait dengan regulasi pelaksanaan sistem zonasi atau jalur domisili pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018. Sejak diterapkan sistem zonasi atau jalur domisili pada tahun 2017, sistem ini memiliki pro kontra yang hadir di kalangan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini ialah guna mengkaji terkait dengan bagaimana implementasi kebijakan pendidikan dalam proses PPDB atau SPMB serta menguraikan faktor pendorong & penghambat yang terjadi saat proses SPMB dilaksanakan dengan menggunakan jalur domisili di DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deduktif dengan

menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini juga menggunakan teori kebijakan publik, & model Implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle, serta model teori Donald Van Metter dan Carl Van Horn (1975).

Indonesia pada tahun 2023 telah menduduki posisi ke-4 (empat) yang memiliki presentase penduduk terbanyak di dunia. Pertumbuhan penduduk yang ada di Indonesia yang setiap tahunnya meningkat, hal ini dapat dilihat berdasarkan laporan BPS, total penduduk Indonesia di pertengahan tahun 2023 telah mencapai sebanyak 278,69 juta jiwa. Presentase tersebut naik sebanyak 1,05 % dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang semakin melonjak tinggi ini tidak serta merta tanpa membawa dampak bagi kehidupan dalam bermasyarakat. Disamping itu, Semakin bertambahnya jumlah kepadatan penduduk, maka Sumber daya manusia (SDM) akan semakin lemah dan presentase kemiskinan juga akan bertambah. Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat di Indonesia berpengaruh juga pada bidang pendidikan. Pendidikan merupakan sebuah kebutuhan tiap manusia yang berfungsi sebagai pondasi bangsa Indonesia, di Indonesia pendidikan itu sendiri dituangkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 terkait dengan SISDIKNAS sebagai pedoman pendidikan.

Pendidikan ialah elemen kehidupan yang berharga, pendidikan sendiri dikatakan sebagai sebuah investasi untuk masa depan individu itu sendiri, yang dimana pendidikan tersebut berbentuk pada meningkatnya kualitas manusia dalam membangun bangsa-bangsanya. Pada zaman sekarang, suatu bangsa dapat

dikatakan berhasil apabila diukur dengan indikator pendidikan, yang berarti sejauh mana masyarakat bangsa tersebut mengenyam pendidikan. Perumpamaannya, apabila bangsa tersebut ingin maju dan berhasil, maka bangsa tersebut harus mengenyam pendidikan yang tinggi. Namun, kualitas pendidikan di Indonesia tidak dilihat dari apa yang diberikan pemerintah saja, seperti sarana dan prasarana saja. Kualitas tersebut dapat dilihat dari sudah sejauh mana hasil yang didapatkan yang membuat sdm tersebut menjadi sdm yang berkualitas dan mumpuni. Pendidikan pastinya selalu mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan adanya perkembangan zaman dalam berbagai aspek di bidang kehidupan. Perkembangan dan perubahan tersebut dapat meliputi berbagai komponen yang ada dalam pendidikan, seperti mutu pendidikan, pelaksana pendidikan, fasilitas pendidikan, kurikulum, & manajemen pendidikan. Pendidikan dilaksanakan baik secara berkeadilan dan juga secara demokratis serta pendidikan dilaksanakan tidak boleh ada diskriminasi. Dapat dilihat dalam pasal 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 terkait dengan pendidikan, pendidikan sendiri ialah sebuah proses & pengubah perilaku individu maupun berkelompok yang bertujuan untuk mengusahakan pendewasaan individu tersebut dengan melalui media pembelajaran.

Berbicara mengenai pendidikan, pendidikan sendiri adalah sebuah proses dan pengubah perilaku individu maupun berkelompok yang bertujuan untuk mengusahakan pendewasaan individu tersebut dengan melalui media pembelajaran. Pendidikan nasional memiliki sebuah fungsi, yakni mengembangkan kemampuan masyarakat Indonesia dan meningkatkan mutu serta

martabat masyarakat Indonesia. Sehingga, dapat diambil kesimpulan, yakni pendidikan ialah cara yang dijalankan lewat beberapa oknum dewasa yang memiliki tujuan guna mengubah pola pikir setiap individu dengan berbagai aspek yang ada seperti aspek kepribadian manusia, baik itu aspek pengetahuan, sikap seseorang, value (nilai) seseorang, maupun keterampilan seseorang yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan individu.

Akses pendidikan yang tidak merata dan susah dijangkau oleh daerah-daerah tertentu menjadikan kurangnya sdm dari segi kualitas, baik kualitas secara kinerja dan sebagainya. Oleh karena itu, indonesia dari segi kualitas pendidikan masih sangat tertinggal jauh dengan beberapa negara yang ada di dunia. Masih banyak capaian pembangunan di Indonesia dalam segi pendidikan yang menunjukkan bahwa indonesia mengalami sebuah ketertinggalan dalam bidang pendidikan, hal ini dilihat berdasarkan hasil riset BPS (Badan Pusat Statistik), yang menyatakan Indonesia menduduki posisi bawah, yakni ada di urutan ke-116 dari 189 negara yang ada. Masalah yang hadir dalam dunia pendidikan ini tak kunjung usai walaupun setiap tahunnya pemerintah mencari cara untuk mengatasinya. Permasalahan pendidikan tersebut meliputi beberapa komponen seperti *input*, *process*, & *output*, yang di mana hal ini berpengaruh pada peningkatan mutu pendidikan. Berikut merupakan permasalahan yang biasa terjadi di Indonesia dan biasanya dipengaruhi oleh :

1. Kualitas SDM yang kurang
2. Fasilitas pembelajaran yang disediakan kurang optimal
3. Pendanaan pendidikan yang kurang memadai

4. Sistem pembelajaran yang tidak efektif dan efisien.

Meratakan pendidikan dimaksud dalam arti pemerataan kesempatan guna memperoleh pendidikan yang baik, di mana pendidikan ini selalu menjadi masalah utama yang menjadi PR pemerintah, terlebih lagi pada negara-negara berkembang. Hal ini pastinya seiring dengan semakin adanya kesadaran dari individu terkait dengan pendidikan yang dimana pendidikan merupakan hal yang sangat penting, pendidikan juga mempunyai peran penting dalam kehidupan individu dan juga dalam meningkatkan pembangunan bangsa.

Dalam memeratakan pendidikan pastinya harus ada dua aspek penting yang dapat dianut, diantaranya :

A. Aspek Equality (Persamaan)

Persamaan dalam arti sama-sama memiliki kesempatan dalam mengenyam pendidikan yang layak.

B. Aspek Equity (Keadilan)

Keadilan dalam arti semua individu atau masyarakat di Indonesia harus memiliki pendidikan yang sama dan tidak dibedakan.

Meninjau lebih jauh, terkait dengan pendidikan yang merata, dapat diartikan bahwa jika semua individu sudah mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama, maka artinya akses pendidikan tersebut sudah merata. Di sisi lain, jika semua individu sudah mendapatkan pendidikan yang sama dan tidak merasa dibedakan, maka hal tersebut juga sudah memenuhi faktor keadilan. Berikut merupakan hasil

riset berupa data yang diambil dari BPS terkait dengan presentase APK pada tahun 2025 & APM Pada Tahun 2024.

Gambar 1.1 Angka Partisipasi Kasar (APK)

38 Provinsi	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan		
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat
	2025	2025	2025
ACEH	108,27	96,12	98,46
SUMATERA UTARA	106,04	90,73	98,33
SUMATERA BARAT	106,47	94,87	95,34
RIAU	107,92	93,96	86,01
JAMBI	107,38	92,72	89,28
SUMATERA SELATAN	107,69	87,24	88,90
BENGKULU	106,86	92,57	96,07
LAMPUNG	105,19	89,19	87,67
KEP. BANGKA BELITUNG	106,87	87,77	86,87
KEP. RIAU	109,49	95,78	90,65

Gambar 1.1 menunjukkan data dari Angka Partisipasi Kasar jenjang Pendidikan di Indonesia pada tahun 2025, Sedangkan Gambar 1.2 dibawah menunjukkan data dari Angka Partisipasi Murni jenjang Pendidikan di Indonesia pada tahun 2024:

Gambar 1.2 Angka Partisipasi Murni (APM)

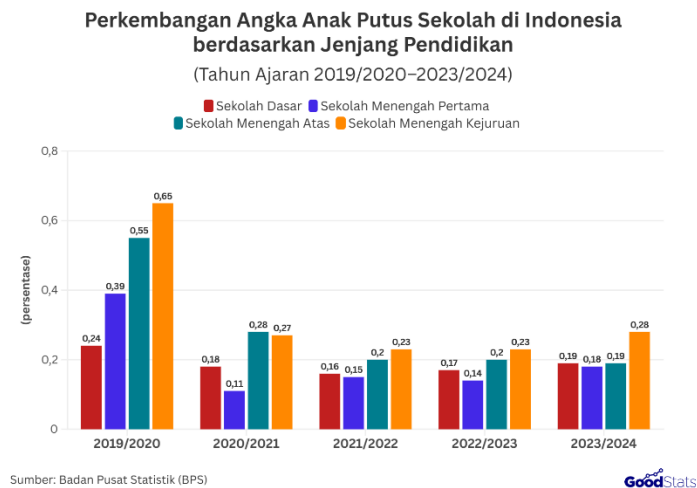
38 Provinsi	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan		
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat
	2024	2024	2024
ACEH	97,96	84,22	70,94
SUMATERA UTARA	97,68	82,15	69,72
SUMATERA BARAT	98,89	82,94	72,50
RIAU	98,45	81,14	68,04
JAMBI	98,17	79,65	62,48
SUMATERA SELATAN	97,53	77,58	62,70
BENGKULU	98,33	82,36	69,14
LAMPUNG	98,33	81,40	64,54
KEP. BANGKA BELITUNG	98,29	77,59	61,71
KEP. RIAU	98,71	87,10	77,54

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2025

Sedangkan, berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah siswa putus sekolah di Indonesia kembali meningkat jika dilihat dari tahun 2020-2024.

Berikut adalah datanya :

Gambar 1.3 Jumlah Siswa Putus Sekolah di Indonesia Tahun 2020 - 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2025

Berikut adalah penyebab-penyebab banyaknya siswa putus sekolah, faktor tersebut merupakan faktor-faktor klasik :

1. Sistem pendidikan sekolah yang dapat dikatakan sulit
2. Banyak orang tua yang tidak bisa membiayai anaknya untuk mengenyam pendidikan karena faktor kemiskinan
3. Budaya, masih banyak budaya masyarakat yang belum mempunyai kesadaran bahwa pendidikan itu penting
4. Kondisi geografis, biasanya karena tinggal di daerah-daerah pelosok
5. Ekonomi keluarga, sehingga anak tersebut harus kerja untuk membantu ekonomi keluarganya
6. Pendidikan sekolah yang dikatakan flat dan tidak menari sama sekali, hal

tersebut dianggap karena sekolah tidak memberikan jaminan kesuksesan.

Dalam permasalahan ini, pemerintah terus berupaya untuk merencanakan dan membuat sebuah kebijakan guna melakukan percepatan pemerataan pendidikan, yang di mana pemerintah membuat sebuah sistem yang biasa dikenal dengan sebutan zonasi atau domisili. Jalur domisili ini berguna untuk meratakan pendidikan di Indonesia, pada penyelenggaraan SPMB pada tahun 2018. Ada beberapa kriteria atau ketentuan yang dibuat dan dituangkan pada Permendikbud No 14 Tahun 2018 memiliki tujuan guna menjadi SPMB terlaksanakan dengan akuntabel, baik, mulus, transparan, dan sebagainya sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan, hal demikian merupakan salah satu faktor pendorong guna meningkatkan akses layanan pendidikan.

Dengan permasalahan yang ada terkait dengan mutu pendidikan yang memiliki kesenjangan antara daerah perkotaan juga daerah pedesaan, pendidikan di Indonesia harus ditingkatkan lagi dalam berbagai aspek. Pemerintah harus terus mengupayakan permasalahan pendidikan ini. Masih banyak daerah-daerah pelosok yang membutuhkan pendidikan yang layak, agar kualitas sumber daya manusia di pelosok juga berkualitas terlebih lagi dalam bidang pendidikan, karena masih banyak yang memerlukan pendidikan yang layak untuk mengantisipasi adanya persaingan global karena sekarang-sekarang ini sudah memasuki era globalisasi. Mereka layak mendapatkan kualitas pendidikan yang baik, terlebih lagi jika ada masyarakat yang memiliki kekurangan fisik seperti difabel dan sebagainya. Berikut data yang diterbitkan oleh *World Population Review*, bahwa indonesia dalam segi

kualitas pendidikan ada di peringkat 54 dari 78 negara di tahun 2021, sedangkan pada tahun 2022- Indonesia menduduki peringkat 55 dari 78 negara, dimana berarti pendidikan di Indonesia dapat dikatakan kurang dari segi kualitas.

Meninjau lebih jauh, berbicara mengenai mutu pendidikan, Mutu pendidikan ini merupakan masalah yang terus kali berulang dari zaman dulu hingga sekarang, yang dimana mutu pendidikan harus selalu diatas agar kualitas mutu pendidikan di Indonesia. Mutu pendidikan sendiri ialah ciri dari pendidikan, di mana hal tersebut sesuai dengan beberapa kriteria tertentu agar masyarakat puas dengan layanan pendidikan yang diberikan, yakni wali murid, peserta didik, dan beberapa pihak lainnya, Dalam hal ini, untuk menjadi kualitas mutu tersebut dibutuhkan adanya *quality control*, yang berguna untuk mengawasi proses dan komponen pendukung.

Ada beberapa komponen dalam pendidikan yang tidak merata, yakni sarana prasarana dan tenaga pendidik yang menghasilkan adanya perbedaan yang dirasakan antara daerah kota dengan daerah terpelosok. Sudah dijelaskan kesenjangan tersebut biasa terjadi antara sekolah di perkotaan dan di pedesaan terlebih lagi desa yang sangat pelosok. Jika dibandingkan, tenaga kerja pendidik yang mengajar di daerah pedesaan biasanya jauh lebih sedikit dari tenaga kerja pendidik yang ada di perkotaan, hal ini mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang pastinya berbeda antara di perkotaan dengan pedesaan. Dengan adanya keterbatasan sarana dan prasana serta tenaga kerja pendidik menyebabkan dan menghasilkan banyak sekali anak-anak di daerah pedesaan masih kurang mempunyai edukasi pendidikan yang baik dan layak, yang nantinya beradampak

pada kualitas sdm yang di masa depan akan menunjang pembangunan di Indonesia.

Dalam proses pendidikan, baik itu pembelajaran dan sebagainya, pastinya diperlukan adanya sekolah sebagai wadah untuk masyarakat mengenyam pendidikannya. Sekolah itu sendiri merupakan *people changing institution*. Sekolah juga dapat didefinisikan sebagai lembaga yang dibuat untuk media pengajaran kepada mahasiswa/i atau peserta murid di bawah pengawasan tenaga kerja pendidik. Pembangunan bangsa yang berhasil dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, dalam hal ini peningkatan kualitas pendidikan merupakan faktor utamanya, dimana faktor kualitas pendidikan dikatakan penting karena mengandung makna setiap individu yang memiliki atau mengenyam pendidikan yang tinggi, maka yang kemampuan yang didapat juga sesuai dengan pendidikan yang dienyam, sehingga individu tersebut nantinya akan dapat berkontribusi lebih dalam meningkatkan pembangunan bangsa.

Pada strategi rencana pendidikan nasional, masalah utama yang harus diatasi lagi-lagi adalah tentang kualitas dan mutu pendidikan. Beberapa upaya sudah dilakukan pemerintah guna mengatasi permasalahan tersebut, termasuk dengan membuat formulasi dan menetapkan sasaran serta tujuan kompetensi pendidikan. Meninjau lebih jauh, membahas tentang kualitas dan mutu pendidikan di Indonesia ini selalu mengalami pasang surut, di mana kualitas dan mutu pendidikan sekolah yang ada di daerah perkotaan dengan daerah pedesaan memiliki kesenjangan dan perbedaan yang sangat signifikan, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu Faktor SDM, Fasilitas, Buku Pendidikan, Siswa itu sendiri.

Pembangunan bangsa yang berhasil dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, dalam hal ini peningkatan kualitas pendidikan merupakan faktor utamanya, dimana faktor kualitas pendidikan dikatakan penting karena mengandung makna setiap individu yang memiliki atau mengeyam pendidikan yang tinggi, maka yang kemampuan yang didapat juga sesuai dengan pendidikan yang dienyam, sehingga individu tersebut nantinya akan dapat berkontribusi lebih dalam meningkatkan pembangunan bangsa.

Pada awalnya, pemerintah melaksanakan sistem PPDB atau SPMB ini hanya berdasarkan zona atau wilayah terdekat saja dari lokasi tempat tinggal calon siswa/i baru tersebut dan hanya diperuntukkan untuk SMP dan SMA saja, sistem tersebut juga lebih akrab disebut dengan istilah “rayonisasi”, yang di mana sistem tersebut sudah pernah diatur oleh Peraturan Gubernur di Provinsi DKI Jakarta. Jika dilihat lagi, Jalur domisili ini juga diberlakukan untuk anak-anak yang tidak memenuhi standar akademik dan bisa dikatakan kurang mampu guna mendapatkan akses dalam megenyam pendidikan di sekolah yang banyak diminati atau biasa dikenal dengan istilah “sekolah favorit” (Risna, Lisdahlia, and Edi 2020). Maka dari itu, sistem ini juga mempunyai tujuan lain untuk memencarkan atau meminimalisir terjadinya penumpukan siswa-siswi yang mempunyai kemampuan yang lebih tinggi di atas rata-rata yang berkumpul dalam satu sekolah favorit tersebut, karena pasalnya sekolah favorit ini sangat diagungkan dan diminati oleh banyak siswa/i.

Jika dilihat dari konsep masing-masing sistem, ada perbedaan dari Jalur domisili dan sistem rayonisasi, yang dimana sistem rayonisasi lebih fokus pada

cluster wilayah terdekat dengan sekolah tertentu. Bila ada seorang calon siswa/i baru yang asalnya dari luar kota atau berada di wilayah kabupaten meskipun berjarak dekat dengan sekolah tersebut, hal tersebut maka akan tetap dianggap tidak masuk domisili atau biasa dikatakan tidak masuk rayon. Sedangkan, jika jalur domisili seorang calon siswa/i baru memiliki lokasi domisili di luar kabupaten, tetapi memiliki KK dan alamat rumah yang masih satu radius dengan sekolah, maka calon siswa/i baru tersebut masih bisa mendaftar pada sekolah tersebut, di Indonesia sendiri banyak masyarakat yang sudah mulai mengenal kata “domisili”, domisili sendiri biasa dikenal dengan masyarakat, yakni lebih identik dengan kata PPDB atau dengan nama yang baru SPMB di sektor pendidikan Indonesia. Domisili banyak memiliki tujuan yang diharapkan termasuk memberikan akses pendidikan yang rata pada calon peserta didik, agar nantinya calon siswa/i tidak perlu lagi mencari sekolah unggulan yang berbeda daerah dengan asalnya sekarang. Jika masih ada masyarakat yang menilai adanya sekolah favorit / sekolah unggulan ke dalam kehidupan mereka, artinya dalam melakukan upaya pemerataan mutu dan kualitas pendidikan yang adil pemerintah masih gagal.

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) merupakan salah satu tahap krusial dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk menjamin akses pendidikan yang adil dan berkualitas bagi semua anak. Di Jakarta, keberadaan SPMB tidak hanya sebagai mekanisme penerimaan siswa baru, tetapi juga sebagai upaya untuk merespons kebutuhan akan peningkatan mutu pendidikan di tengah urbanisasi dan dinamika sosial yang semakin kompleks.

SMPN 143 Jakarta, sebagai salah satu institusi pendidikan negeri, dihadapkan pada tantangan untuk menarik siswa-siswa yang berpotensi dan memastikan bahwa proses penerimaan berlangsung transparan dan akuntabel. Kebijakan SPMB di sekolah ini diharapkan dapat memberikan peluang yang sama bagi seluruh calon peserta didik, tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, atau budaya.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta menetapkan empat jalur seleksi dalam SPMB 2025 jalur domisili, afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau wali termasuk anak guru dan tenaga kependidikan, serta jalur prestasi. Di antara semua jalur tersebut, Domisili memiliki porsi penerimaan paling banyak. Untuk tingkat SD, sekitar 73 persen murid baru diterima lewat jalur ini, sementara untuk SMP dan SMA disediakan sedikitnya 50 persen dari total kuota. Selain persyaratan umum seperti Kartu Keluarga yang wajib terbit minimal satu tahun sebelum pendaftaran orang tua dan calon siswa juga perlu mengetahui sistem prioritas dalam jalur domisili. Aturan tersebut diatur dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2024 mengenai PPDB atau sekarang disebut SPMB.

Selain itu, dalam konteks kebijakan pendidikan nasional, implementasi SPMB di SMPN 143 Jakarta juga berkaitan erat dengan upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui jalur domisili. Dengan jalur ini, diharapkan siswa dapat diterima di sekolah terdekat yang sesuai dengan domisili mereka, sehingga mengurangi beban perjalanan dan meningkatkan partisipasi keluarga dalam pendidikan. Dalam pelaksanaannya, SPMB SMPN 143 Jakarta harus menghadapi berbagai tantangan, seperti kepadatan penduduk yang

tinggi, minat masyarakat terhadap sekolah favorit, serta keterbatasan kapasitas ruang kelas. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif dalam penyampaian informasi, pendaftaran, serta penilaian calon siswa agar proses penerimaan berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang optimal.

Melalui kebijakan ini, SMPN 143 Jakarta berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan kondusif, di mana setiap anak memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya secara maksimal. Implementasi SPMB yang baik akan menjadi langkah awal menuju tercapainya tujuan pendidikan yang lebih besar, yaitu menciptakan generasi muda yang berkarakter, kompeten, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Pendidikan merupakan aspek vital dalam pengembangan masyarakat.

Dengan fokus pada SPMB, dapat mengeksplorasi bagaimana kebijakan ini berkontribusi terhadap akses pendidikan yang adil dan berkualitas, terutama di Jakarta. Topik ini memungkinkan analisis mengenai upaya pemerintah dalam memastikan kesetaraan kesempatan bagi semua calon peserta didik, terlepas dari latar belakang sosial dan ekonomi. Hal ini sangat relevan dalam konteks pemerataan pendidikan di Indonesia. Implementasi jalur domisili dalam SPMB memberikan kesempatan untuk membahas keuntungan dan tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap pemilihan sekolah oleh orang tua dan siswa. Ini merupakan isu yang menarik dan penting dalam konteks pendidikan saat ini. Jakarta sebagai ibukota dan pusat urbanisasi memiliki tantangan unik dalam hal kepadatan penduduk dan permintaan pendidikan.

Menyelidiki bagaimana SMPN 143 Jakarta mengatasi tantangan ini dapat memberikan wawasan berharga untuk sekolah lain di daerah serupa. Analisis tentang bagaimana kebijakan SPMB mempengaruhi kualitas pendidikan di SMPN 143 dapat memberikan gambaran tentang hubungan antara proses penerimaan dan hasil belajar siswa, serta pentingnya manajemen sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang baik. Proses SPMB juga melibatkan partisipasi aktif dari orang tua dan masyarakat. Dengan mengeksplorasi dinamika ini, kita dapat memahami peran serta masyarakat dalam mendukung pendidikan dan bagaimana hal ini mempengaruhi keputusan penerimaan siswa.

Sistem pendidikan di Indonesia dirancang dengan melibatkan banyak pihak agar semuanya dapat berperan sebagai penggerak perubahan. Berbagai elemen seperti sekolah, guru, siswa, keluarga, dunia usaha/industri, komunitas masyarakat, hingga perusahaan teknologi pendidikan turut mengambil bagian. Tujuan utamanya adalah menciptakan pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkannya, pemerintah menyusun beberapa langkah yang menjadi dasar program Merdeka Belajar. Ada sepuluh kebijakan baru yang disiapkan sebagai penyempurnaan dari sistem sebelumnya, dan semuanya tercantum dalam Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020–2035. Salah satu kebijakan awal dalam Merdeka Belajar adalah mendorong kerja sama dan pendampingan antar sekolah. Sebelumnya, setiap pemangku kepentingan cenderung bekerja secara terpisah dengan sistem masing-masing, dan sekolah sering terbebani oleh banyak aturan administratif. Melalui kebijakan ini, kolaborasi dilakukan di berbagai jenjang mulai dari TK, SD, SMP, SMA hingga pendidikan nonformal.

Kebijakan ini menargetkan empat hal utama: pembentukan sekolah penggerak, kegiatan belajar antar-sesama guru atau siswa, pengelolaan administrasi secara bersama, serta penguatan pendidikan informal yang berbasis nilai. Melalui empat poin tersebut, sistem pendidikan yang dulu berjalan tertutup diharapkan berubah menjadi lebih terbuka dan kolaboratif. Kebijakan berikutnya menekankan pengembangan platform pendidikan nasional berbasis teknologi. Platform ini dirancang agar berfokus pada kebutuhan siswa, lintas disiplin, relevan, berbasis proyek, dan mendorong kerja sama. Saat platform ini diterapkan, sekolah juga akan mendapatkan dukungan berupa bantuan kuota internet, penyediaan perangkat belajar, serta peningkatan akses listrik dan jaringan terutama untuk daerah 3T.

Selanjutnya, pemerintah menata ulang kurikulum, metode pembelajaran, dan sistem penilaian agar lebih sesuai dengan kebutuhan masa depan. Perubahan ini mencakup penyederhanaan materi, penguatan literasi dan numerasi, pengembangan karakter, serta pembelajaran yang fleksibel dan berbasis kompetensi. Hasil yang diharapkan adalah terbentuknya profil pelajar Pancasila. Untuk penilaiannya, digunakan tiga instrumen utama: AKM, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar.

Kebijakan pendidikan baru ini menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar pemerataan pendidikan bisa benar-benar tercapai. Kolaborasi dilakukan secara lebih dekat melalui pendampingan dan konsultasi, serta pemberian penghargaan bagi daerah yang berprestasi. Pemerintah juga akan mengawasi penggunaan anggaran, pembangunan fasilitas, sistem

penerimaan siswa termasuk domisili, dan distribusi guru supaya kualitas layanan pendidikan merata.

Kemendikbud juga menyiapkan konsep sekolah masa depan yang berfokus pada lima hal yaitu lingkungan yang aman dan ramah untuk semua, pemanfaatan teknologi, pembelajaran kolaboratif, pengembangan kreativitas, dan kegiatan belajar berbasis pengalaman. Lingkungan yang aman dan inklusif mencakup bangunan yang layak, fasilitas tanggap bencana, akses bagi penyandang disabilitas, serta suasana sekolah yang bebas dari perundungan dan diskriminasi.

Pemanfaatan teknologi dalam kebijakan ini terlihat dari penggunaan kelas digital yang terhubung internet, ketersediaan komputer bagi siswa, serta akses belajar secara online. Pendekatan kolaboratif diterapkan dengan membuat ruang kelas yang mudah disusun ulang menjadi kelompok-kelompok kecil agar siswa dapat berlatih kerja sama, empati, dan kemampuan memimpin. Aspek kreatif memberi ruang bagi guru dan siswa untuk menata kelas sesuai kebutuhan agar ide dan kreativitas lebih berkembang. Sementara itu, pembelajaran berbasis pengalaman dilakukan melalui kegiatan yang membuat siswa belajar langsung dari praktik dan situasi nyata.

1.2 Rumusan Masalah

Dari masalah-masalah yang sudah dikaji tersebut, dengan itu terdapat beberapa topik yang menjadi rumusan, diantaranya :

1. Bagaimana implementasi kebijakan pendidikan dengan melalui jalur

domisili pada SPMB di Jakarta Utara khususnya di SMPN 143 Jakarta?

2. Apa saja aspek yang menjadi faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi kebijakan pendidikan dengan jalur domisili dalam proses SPMB di Jakarta Utara khususnya di SMPN 143 Jakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang disajikan dalam latar belakang masalah, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk Menganalisis terkait implementasi kebijakan pendidikan dengan melalui jalur domisili pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jakarta Utara khususnya di SMPN 143 Jakarta.
2. Untuk mengenali apa saja aspek yang menjadi faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi kebijakan pendidikan dengan jalur domisili dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jakarta Utara khususnya di SMPN 143 Jakarta.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Pada penelitian ini bertujuan agar pembaca diharapkan untuk dapat menambah *insight* baru baik pengetahuan maupun wawasan serta diharapkan pembaca agar memahami teori-teori mengenai kebijakan pendidikan, penelitian ini juga nantinya dapat digunakan sebagai wadah dan media guna mengembangkan

pengetahuan serta menjadi bahan literatur guna menambah rencana baru bagi penyumbang akademis peneliti serta penelitian ini juga kedepannya dapat digunakan untuk bahan perbandingan penelitian. melalui eksplorasi, interaksi dengan lingkungan dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah dunia nyata.

Pada penelitian ini memiliki kegunaan praktis yang bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan juga instansi terkait :

1. Bagi Penulis

Kegunaan penelitian ini bagi penulis agar penulis bisa mengimplementasikan teori-teori yang diperoleh dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari nantinya, menambah *insight* dan pengalaman, dan menambah pengetahuan penulis mengenai permasalahan yang sama dengan judul penelitian yang diambil.

2. Bagi Pembaca

Manfaat praktis untuk pembaca adalah agar bertambahnya ilmu mengenai topik yang dikaji dalam penelitian ini, & dapat digunakan sebagai bahan referensi apabila pembaca ingin meneliti topik ini lebih lanjut.

3. Bagi Instansi Terkait

Manfaat praktis bagi instansi terkait adalah diharapkan melalui penelitian ini instansi terkait dapat mengambil informasi yang bermanfaat agar nantinya bisa menjadi bahan evaluasi untuk ke depannya apabila ingin menerapkan kebijakan pendidikan ini lagi.

1.5 Kerangka Penelitian Terdahulu

1.5.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis, Tahun, Judul	Tujuan	Metode dan Teori	Hasil dan Diskusi	Kesimpulan	Link
1.	Mila Karmila, Niswatu Syakira, & Mahir Mahir // 2020 // Analisis kebijakan sistem pendidikan dalam penerimaan peserta didik baru. Jurnal mappesona, 3(1).	Penelitian ini memiliki tujuan guna menelaah lebih dalam terkait dengan penerapan kebijakan sistem zonasi dalam proses PPDB	Kualitatif Deskriptif	Penerapan sistem zonasi di Indonesia memiliki banyak manfaat, Maka dengan itu diperlukan lagi langkah yang menjadi faktor pendorong guna pemerataan pendidikan yang memiliki kualitas yang tinggi. Maka dengan itu, diperlukan zona pengkhususan guna meratakan hal tersebut.	Disarankan untuk Survei atau wawancara mendalam untuk memahami persepsi orang tua dan siswa terhadap kebijakan zonasi, termasuk manfaat dan kendala yang mereka hadapi.	https://ejournal.iain-bone.ac.id/index.php/mappesona/article/download/827/559
2.	Elsa Nida Pangaribuan // 2019// Implementasi Kebijakan	Penelitian ini memiliki tujuan, Yakni guna menguraikan bagaimana	Kualitatif (Studi Kasus)	Penerapan kebijakan tersebut di Kab Gresik sudah dapat dikatakan baik. Namun, hal yang menjadi penghambat penerapan kebijakan sistem	Untuk penelitian lebih lanjut tentang implementasi kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SMP di Kabupaten Gresik yang dapat	https://journal.pencerah.org/index.php/jspi/article/view/161

	Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP di Kabupaten Gresik Jurnal Inspirasi manajemen pendidikan	penerapan kebijakan sistem zonasi & Penghambat yang ada pada saat proses PPDB pada SMP di Kab Gresik.		zonasi dalam proses PPDB ini adalah pelaksanaan sosialisasi kurang digencarkan, sehingga memiliki penyebab yang berdampak pada masyarakat sekitar Kab Gresik.	diangkat dalam Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan adalah Analisis Dampak Sosial, eliti bagaimana sistem zonasi memengaruhi komposisi sosial di sekolah-sekolah. Apakah ada perubahan dalam keragaman sosial dan budaya di lingkungan sekolah	
3.	Samsul Hadi, Giri Wiyono, &AbdulRahim //2022// The Impact of the Enrollment Zoning System on the Learning Quality of General Secondary Schools in Special Region of Yogyakarta. In 5th International	Memiliki tujuan guna menjabarkan dampak-dampak yang dihasilkan dari penerapan sistem zonasi dalam PPDB pada SMK di Yogyakarta	Kualitatif Deskriptif	Hasil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan kualitas antara SMK-SMK yang ada di Yogyakarta.	Lakukan analisis perbandingan antara sekolah-sekolah dalam zona yang berbeda dan sekolah yang tidak terpengaruh oleh sistem zonasi untuk mengevaluasi perbedaan dalam kualitas pembelajaran dan hasil akademik.	https://www.atlantipress.com/proceedings/iccie-21/125969672

	Conference on Current Issues in Education (ICCIE 2021) (pp. 175-180). Atlantis Press.					
4.	Zhafira Wirananda, Amy Yayuk Sri Rahayu // 2020// Quality of Public High School Education Analysis in Bekasi City After the Enactment of Zoning System. 17. In ICASPGS 2019:Proceedings of the 3rd International Conference on Administrative Science, Policy, and Governance Studies, ICAS- PGS	Memiliki tujuan guna mengkaji kualitas pendidikan SMA di Bekasi sebelum dan sesudah diterapkan.	Kualitatif (PostPositivis)	Sistem zonasi memiliki banyak manfaat terlebih lagi dalam segi kualitas. Namun, apabila sekolah di Bekasi tersebut sebelumnya memiliki stigma favorit dari masyarakat, Maka tidak juga memiliki peningkatan dari segi kualitas (stagnan)	Penelitian tentang kualifikasi dan pelatihan tenaga pendidik di sekolah-sekolah yang terpengaruh oleh zonasi, serta dampaknya terhadap kualitas pengajaran dan pembelajaran.	https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=dkUqEAAAQBASchool+Education+Analysis+in+Bekasi+City+After+the+Enactment+of+Zoning+System .

	2019, October 30-31, Universitas Indonesia, Depok. Indonesia (p. 11). European Alliance for Innovation.					
5.	Ariek Tri Ariani // 2020 //The implementation Of zoning system in suburban schools in Tulungagung Regency, Indonesia. Harmoni Sosial:Jurnal Pendidikan IPS, 7(2), 183-189.	Memiliki tujuan guna mengkaji terkait dengan bagaimana hubungan dari sistem zonasi di Kab Tulungagung	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian tersebut adalah menjelaskan bahwa penerapan sistem zonasi di Kab Tulungagung sudah mencapai aspek-aspek dalam teori yang digunakan & masukan untuk sekolah-sekolah di Kab Tulungagung adalah meningkatkan kualitas dari segi pembelajaran, fasilitas, dan sebagainya.	Mengnalisasi mengenai ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah-sekolah pinggiran dan bagaimana hal tersebut dipengaruhi oleh sistem zonasi.	https://journal.uny.ac.id/index.php/hsjpi/article/view/30343
6.	Erni Dewi Riyanti, Haerini Ayatina, Fakhriyah Tri Astuti, &Putri Jannatur	Memiliki tujuan guna mengkaji ulang apa saja yang menjadi maslaah terkait dengan kebijakan PPDB dengan	Kualitatif Deskriptif	Penerapan kebijakan PPDB melalui sistem zonasi ini dapat dinilai cukup efektif. Namun yang menjadi masalah adalah banyaknya komplain dari guru-guru mengenai siswa/i yang dinilai memiliki perilaku	Penelitian mengenai dampak sosial dan ekonomi dari sistem zonasi terhadap masyarakat, termasuk perubahan dalam mobilitas sosial dan akses ke pendidikan berkualitas.	https://www.atlantipress.com/proceedings/psshers-19/125943585

	Rahmah // 2020// Zoning system of Education in Indonesia challenges and their future. In 1st Progress in Social Science, Humanities and Education Research Symposium (PSSHERS 2019) (pp. 1111-1114). Atlantis Press	menggunakan sistem zonasi.		bandel atau kurang sopan, diduga hal tersebut merupakan salah satu masalah yang timbul akibat penerapan kebijakan PPDB.		
7.	Muhammad Iqbal, Hasnawi Haris, Risma Niswaty //2021 // Implementation of the Zoning System Policy in Bulukumba Regency. Jurnal Ad'ministrare, 8(1), 119-128.	Penelitian ini memiliki tujuan guna mengkaji bagaimana penerapan kebijakan sistem zonasi diKab Bulukumba dalam proses PPDB & mengetahui faktor- faktor yang ada dalam penerapan kebijakan tersebut.	Kualitatif Deskriptif	Hasil dari penelitian ini adalah tentang penjelasan terkait dengan penerapan kebijakan sistem zonasi tersebut yang dikaitkan dengan beberapa elemen dalam teori Edward III yang hasilnya mengatakan bahwa penerapan tersebut kurang efektif & faktor penghambat yang ada ialah minimnya pengetahuan orang tua terkait dengan PPDB yang dilaksanakan secara online.	Melakukan penelitian untuk mengevaluasi dampak sistem zonasi terhadap akses pendidikan bagi siswa dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi di Bulukumba.	https://eprints.unm.ac.id/30355/

8.	Ambuy Sabur, Estu Niana Syamiya, Yasinta Nely //2022// Analisis Sistem Zonasi di Sekolah Menengah Atas. Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya, 8(3), 1137- 1144.	Penelitian ini memiliki tujuan yang fokus pada penjabaran terkait dengan zona-zona khusus serta daya tampung dari sistem zonasi ini.	Kualitatif Deskriptif	Hasil dari penelitian ini menguraikan terkait dengan zona-zona yang diatur dalam Peraturan Gubernur dengan daya tampung. Tetapi, pelaksanaan sistem zonasi ini dinilai tidak begitu efektif karena lagi-lagi kurang banyaknya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat	Riset untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan zonasi di tingkat lokal, termasuk tantangan yang dihadapi dan rekomendasi untuk perbaikan.	https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/693
----	---	--	-----------------------	--	---	---

1.5.2 Administrasi Publik

Administrasi publik ialah sebuah pecahan dari konsep administrasi umum, yang dimana administrasi publik itu sendiri merupakan ilmu yang sangat luas untuk dipelajari. Dalam hal ini, administrasi publik mempelajari ilmu dari lembaga bagian terkecil hingga lembaga yang besar. Administrasi publik juga sebuah ilmu yang didalamnya terdapat pelajaran mengenai cara pemerintah memperoleh hal yang diinginkan masyarakat (Dimock, 1992). Hal tersebut diartikan bahwa administrasi publik tidak hanya membahas apa yang masyarakat inginkan, tetapi juga bagaimana cara pemerintah untuk menggabungkan dan memperoleh apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berikutnya, administrasi publik juga merupakan turunan dari administrasi dan politik (Thoha, 1997), yang berarti administrasi publik juga berkaitan dengan lingkup politik yang dimana administrasi publik diselenggarakan oleh negara/pemerintah. Lalu, administrasi publik juga membahas terkait dengan MSDM & dengan lingkup publik yang berguna untuk mencapai tujuan yang sebelumnya sudah ditetapkan (Waldo, 1971).

Administrasi publik juga diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan oleh beberapa orang atau lebih (kelompok) guna membangun kerjasama untuk mencapai tujuan yang sebelumnya sudah ditentukan, hal yang serupa juga disampaikan oleh (Tjokroamidjojo, 1978), yakni administrasi publik merupakan ilmu yang menjelaskan terkait dengan beberapa individu (kelompok) yang membangun kerjasama untuk mencapai tujuan yang sebelumnya sudah ditentukan. Terakhir, administrasi publik dikatakan bahwa ilmu yang mencakup semua proses dimulai dari penentuan sampai norma-norma yang memiliki sifat keseluruhan

(Bunyamin, 1991). Maka dari itu, dapat diambil kesimpulan terkait dengan konsep administrasi publik, yakni sebuah ilmu yang mempelajari terkait dengan serangkaian kegiatan yang dibangun dalam kerjasama beberapa individu (kelompok) untuk mencapai tujuan tertentu seperti menyelesaikan tugas pemerintah untuk mengatasi apa yang sedang dibutuhkan dan dipentingkan oleh masyarakat baik secara efektif dan juga secara efisien.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Administrasi itu sendiri dapat dilihat dari perspektif etimologi yang berasal dari dua kata larin, yakni “ad” dan “ministrate” yang memiliki arti memenuhi / melayani, berikutnya definisi dari adminitrasi publik itu sendiri adalah sebuah bentuk tindakan/kegiatan yang dilakukan oleh beberapa individu atau lebih dalam lingkup kerja publik, dalam lingkup tersebut terdapat 3 (tiga) lingkup, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Paradigma administrasi publik adalah suatu pola pikir atau kerangka konseptual yang menjadi dasar dalam memandang, menganalisis, dan mengembangkan ilmu administrasi publik (Indradi et al., 2010). Menurut Nicholas Henry dalam buku Pengantar Ilmu Administrasi Publik (Malawat, 2022) mengidentifikasi 5 (lima) paradigma dalam administrasi publik, sebagai berikut :

Paradigma Pertama (1900-1926), paradigma ini sering dikenal dengan nama Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi / teori klasik. Paradigma pertama ini menjelaskan terkait dengan kewajiban politik yang mesti fokus terhadap kebijakan yang sebanding dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat sedangkan

administrasi yang akan menjalankan pengawasan terhadap proses implementasi kebijakannya. Pemerintah tergolong menjadi 3 (tiga) bagian, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif sendiri fokus dan memiliki tujuan untuk mencurahkan apa yang menjadi keinginan masyarakat, lalu untuk eksekutif sendiri merupakan badan yang menjalani keinginan tersebut, dan yudikatif merupakan badan yang memiliki tugas untuk membantu legislatif dalam merancang dan membentuk suatu kebijakan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga, hal ini dapat mencapai tujuan terkait dengan rancangan kebijakan. hal tersebut disebabkan oleh penggolongan yang dibuat antara administrasi dan politik.

Paradigma Kedua (1927-1937), Paradigma ini menekankan fokus dianggap yang terpenting, sementara lokus tidak dipermasalahkan. Administrasi publik dipandang memiliki sifat universal, artinya dapat diimplementasikan pada semua tatanan administrasi tanpa mempedulikan kebudayaan, fungsi, lingkungan, misi, atau kerangka institusi. Prinsip-prinsip dipandang sebagai unsur penting bagi administrasi sebagai suatu ilmu.

Paradigma Ketiga (1950-1970), Paradigma ketiga ini dikenal dengan sebutan Administrasi Publik sebagai ilmu politik, seorang ahli bernama Herbert Simon melontarkan sebuah kritik yang pedas terkait dengan perubahan dari prinsip administrasi, yang menyebabkan prinsip tersebut tidak universal. Pada paradigma ini menjadikan administrasi publik selaku sebuah ilmu politik yang memiliki fokus pada birokrasi pemerintah & sifat yang asbtrak karena prinsip tersebut memiliki banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu, pada akhirnya administrasi ini mengalami konfrontasi jati karena menganggap bahwa ilmu politik merupakan ilmu

yang memiliki pengaruh besar di studi administrasi publik ini. krisis identitas karena menganggap ilmu politik merupakan ilmu yang dominan dalam studi administrasi publik.

Paradigma Keempat (1956-1970), Paradigma ini dikenal dengan penjelasannya yang menjelaskan bahwa Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi. Karena sebelumnya ada paradigma yang menjelaskan terkait dengan prinsip-prinsip, maka pada paradigma yang ke-4 ini fokus untuk mengembangkan prinsip-prinsip tersebut. Paradigma ini fokus pada beberapa ilmu, yakni *management analysis* , pengimplementasian *modern technology* (metode kuantitatif, analisis sistem, riset dan lain-lain), dan perilaku organisasi. Paradigma yang ke-4 ini memiliki perkembangan dan terbagi menjadi 2 (dua) arah, yakni ilmu administrasi itu sendiri (murni) yang diperkuat dengan dua arah yaitu orientasi dalam kebijakan publik dan psikologi sosial.

Paradigma Kelima (1970-Sekarang), Paradigma yang kelima ini menjelaskan terkait dengan Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Lokus dan fokus dari paradigma yang ke-lima ini sudah banyak dibahas. Pada fokus paradigma kelima ini adalah terkait dengan beberapa teori baik dalam organisasi maupun teori manajemen, & kebijakan publik. Selanjutnya, untuk lokusnya itu sendiri paradigma kelima ada pada masalah masalah publik dan juga kepentingan-kepentingan publik.

Pada penelitian ini termasuk kedalam Paradigma 5 (lima) : Governance karena dalam melakukan kebijakan pendidikan jalur domisili dalam proses SPMB untuk menyelesaikan permasalahan pemerataan pendidikan, menyerukan

partisipasi sejumlah pihak selain pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan jalur domisili dalam proses SPMB yang terfokus pada SMP-SMP Negeri DKI Jakarta menjadi subjek penelitian ini & diperlukan teori administrasi publik, dimana kebijakan tersebut disusun dan dibentuk seperti apa yang telah ditetapkan saat ini.

1.5.4 Kebijakan Publik

Kebijakan publik ialah ilmu yang dapat dikatakan baru secara sejarah, awalnya kebijakan publik ini muncul sekitar dasawarsa tahun 1960-an, dimana kebijakan publik ini selaku sebuah ilmu yang merujuk pada cakupan *public administration* (administrasi publik) dan juga *political science* (ilmu politik). Dengan itu, perkembangan terkait dengan teori kebijakan publik ini memberikan dampak pada konsep perkembangan melalui gagasan terkait dengan cara pemerintah dalam melakukan perancangan, perancangan, penerapan, dan pengevaluasian terhadap kebijakan publik. Berbicara mengenai kebijakan publik, kebijakan publik itu sendiri merupakan *whatever choose to do or not to do* yang berarti apapun yang jadi pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan (Thomas R. Dye, 1981) menjelaskan jumlah kegiatan pemerintah, baik yang bertindak secara langsung maupun melalui agen-agen terkait, sebagai yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan warga negara (Peters, B. Guy, 2015).

Kebijakan publik juga membahas terkait dengan tindakan pemerintah guna mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat (Peterson, Steven A., 2003). Kebijakan publik juga dapat didefinisikan sebagai sebuah kegiatan yang direncanakan dengan berbagai tujuan, praktik, dan nilai-nilai tertentu (Harold

Laswell dan Abraham Kaplan, 1995). Dengan begitu, apapun perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah baik secara tersurat maupun tersirat dapat dikatakan sebagai kebijakan, perbuatan tersebut berguna untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat (Thomas R. Dye, 1981 ; Peterson, Steven A., 2003). Maka dari itu, teori kebijakan publik berbicara mengenai perbuatan yang mau dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah (Thomas R. Dye, 1981), yang dimana perbuatan tersebut untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat (Peters, B. Guy, 2015), dan untuk mencapai tujuan-tujuan, nilai, dan praktik yang sebelumnya sudah ditentukan (Harold Laswell dan Abraham Kaplan, 1995).

1.5.5 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter & Van Horn biasa dikenal dengan nama *a model of the policy implementation process*. Teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter & Van Horn itu sendiri ada karena sebuah pendapat bahwa pada saat pelaksanaan implementasi kebijakan akan memiliki perbedaan yang dipengaruhi berdasarkan sifat dalam pelaksanaannya. Implementasi kebijakan itu sendiri menurut Van Meter & Van Horn (Winarno, 2008). merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan karena adanya keputusan sebelumnya. Aktivitas ini dimaksud untuk mengubah keputusan menjadi kegiatan operasional dengan waktunya yang terbatas, dan juga tindakan untuk mencapai perubahan berdasarkan keputusan yang tadi sudah ditetapkan oleh organisasi publik. Disamping itu, model implementasi kebijakan (Van Meter & Van Horn, 1975) memiliki 6 (enam) variabel, diantaranya :

1. Standar dan sasaran kebijakan

Penting bagi pemerintah guna mengidentifikasi serta mengevaluasi tujuan dan sasaran satu program guna menilai kesuksesan atau kegagalannya. Untuk menentukan parameter dasar untuk sasaran- sasaran-sasaran ini, pedoman regulasi / pedoman program dapat digunakan, yang mencakup kriteria evaluasi kinerja kebijakan.

2. Komunikasi antar organisasi

Efektivitas implementasi bisa diukur oleh konsistensi dan ketepatan informasi yang disampaikan kepada berbagai sumber. Ada dua jenis kegiatan dalam hubungan antar organisasi. Pertama, memberikan nasihat dan bantuan teknis, di mana pejabat tingkat tinggi memberikan bimbingan kepada pejabat di tingkat lebih rendah untuk memperlancar pelaksanaan kebijakan. Kedua, pejabat tingkat tinggi dapat memberikan sanksi, baik positif maupun negatif.

3. Karakteristik organisasi pelaksana

Faktor ini tidak terlepas pada struktur birokrasi, dimana struktur ini mencakup berbagai hal, yakni karakteristik, pola hubungan, & norma dalam badan eksekutif yang memiliki hubungan dengan pelaksanaan kebijakan.

4. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik

Faktor ini memengaruhi pencapaian badan yang melaksanakan. Lingkungan ekonomi, sosial-ekonomi, isu kebijakan yang saling terkait, dan dukungan dari elit, publik, atau sektor swasta adalah pertimbangan yang relevan.

5. Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya guna menyelenggarakan suatu kebijakan sangat mendukung adanya efektivitas penyelenggaraannya, ini termasuk dalam pendanaan & insentif lainnya yang dapat meningkatkan efisiensi implementasi. Namun, faktanya Sumber daya keuangan adalah elemen utama yang menentukan kesuksesan tersebut

6. Sikap / karakter pelaksana

Pada tahap ini, peran individu menjadi kunci. Kesuksesan implementasi kebijakan bergantung pada pemahaman dan penerimaan ukuran dasar dan rujukan kebijakan. Penolakan dari kelompok pelaksana dapat menghambat implementasi, dan intensitas kecenderungan para pelaksana juga memengaruhi kinerja kebijakan, terutama jika mereka memiliki alternatif negatif untuk menentang tujuan program.

Berbeda dengan itu, Daniel A. Mazmanian & Paul Sabatier dalam (Wahab, 2008), menjelaskan terkait faktor penting dalam proses menganalisis implementasi kebijakan adalah dengan mengenali terlebih dahulu terkait dengan variabel apa saja

yang sangat mempengaruhi tujuan formal yang ada pada seluruh proses implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan hal yang dalam prosesnya dapat dikatakan kompleks, karena dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan harus diikuti dengan faktor-faktor terkait, implementasi kebijakan ialah suatu hal yang paling utama pada studi administrasi dan kebijakan publik.

Implementasi Kebijakan dapat dikategorikan sebagai tahap dalam membuat kebijakan, yakni diantara pembuatan kebijakan dan konsekuensi kebijakan terhadap masyarakat yang dipengaruhinya (Edwards, 1980). Selanjutnya, adalah model yang dikembangkan oleh Merilee S. Grindle. Grindle dalam padangan Wahab mengungkapkan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah komponen yang sangat vital dalam keseluruhan manajemen kebijakan. Ide dasar implementasi kebijakan menurut Grindle adalah bahwa setelah kebijakan mengalami proses transformasi, maka implementasi kebijakan akan dijalankan (Nugroho, 2013). Grindle memperkenalkan sebuah konsep terkait dengan pelaksanaan kebijakan ialah sebuah proses yang menggambarkan hubungan antara politik dan administrasi serta tidak hanya terbatas dalam elemen birokrasi sebagai implementator, akan tetapi juga mempertimbangkan dengan seksama kelompok target sasaran yang terlibat secara menyeluruh.

Dalam model ini, proses pengambilan keputusan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang beragam. Hasil akhir dari proses ini dapat ditentukan oleh materi program / interaksi antara para pemangku keputusan pada kerangka kerja administratif. Menurut Merilee S. Grindle (1980), keberhasilan

dalam implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel Isi Kebijakan terdiri atas (Grindle dalam Nugroho, 2014:671), Sampai sejauh mana keberpihakan terhadap kelompok sasaran tercermin dalam konten kebijakan;

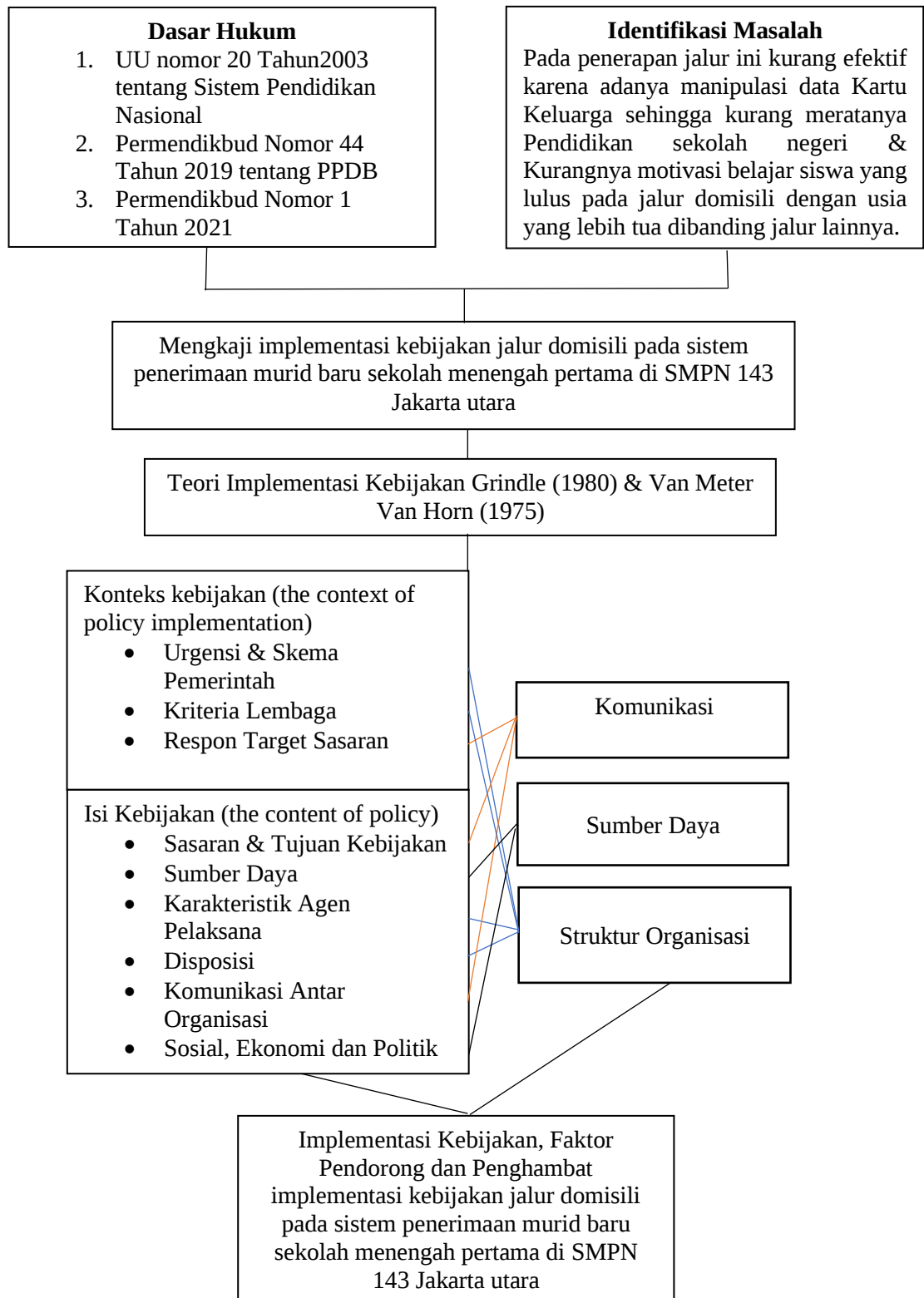
1. Ragam manfaat yang dinikmati oleh anggota kelompok sasaran;
2. Sejauh mana perubahan yang diharapkan dari kebijakan tertentu;
3. Apakah lokasi program sudah sesuai;
4. Sudahkah program tersebut secara rinci menyebutkan pelaksanaannya;
5. Apakah sumber daya yang dibutuhkan sudah mencukupi.

Maka dari itu, dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan merupakan sebuah tindakan yang sangat kompleks dan melibatkan beberapa aktor kebijakan (*stakeholders*). Sehingga, dari proses implementasi kebijakan tersebut menghasilkan sebuah tujuan-tujuan kebijakan itu sendiri, karena sudah dijelaskan bahwa implementasi kebijakan tidak akan bisa di mulai / diterapkan apabila tujuan-tujuan tersebut ditetapkan. Model yang menjadi fokus pada penelitian kebijakan pendidikan ini adalah model milik Van Meter & Van Horn, yang menjelaskan terkait dengan 6 (enam) variabel yang ada, karena model implementasi kebijakan tersebut banyak digunakan dalam penelitian implementasi kebijakan, khususnya kebijakan pendidikan dan juga karakteristik yang ada pada model ini sesuai dengan penelitian ini.

1.5.6 Domisili Pendaftaran Murid Baru

PPDB dalam Pasal 1 Ayat 7 pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2019 dituangkan dengan arti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). PPDB atau SPMB ini memiliki tujuan guna mewadahi masyarakat Indonesia untuk memperoleh kesempatan dalam mengenyam pendidikan yang berkualitas. PPDB atau SPMB ialah sebuah alur utama dalam proses penerimaan siswa/i baru, juga merupakan proses yang bergerak di bidang pendidikan di sekolah. PPDB atau SPMB dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prinsip good governance dan tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia No.3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Pasal 3 poin 1. SPMB dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis



1.7 Operasionalisasi Konsep

Tabel 1.7. Operasionalisasi Konsep

Variabel	Definisi Konsep	Definisi Operasional	Operasionalisasi
Implementasi Kebijakan	Implementasi Kebijakan ialah sebuah proses dalam menangani masalah publik yang hadir di masyarakat, penerapan kebijakan juga merupakan sebuah jawaban dari masalah yang hadir dalam masyarakat tersebut. Dalam konsep implementasi kebijakan ini, melibatkan dua elemen, yakni Isi Kebijakan (the content of policy), dan Isi Kebijakan (the content of policy)	Isi Kebijakan (the content of policy)	Dalam kebijakan tersebut, sudah sampai mana isi dari kebutuhan sasaran kebijakan yang ada dalam kebijakan tersebut. Apa dampak yang diterima sasaran kebijakan dalam penerapan kebijakan pendidikan tersebut. Bagaimana bentuk reformasi dari diimplementasikan nya kebijakan pendidikan ini. Pelaksana kebijakan pendidikan di DKI Jakarta. Sumber daya terkait penerapan kebijakan tersebut ialah pemerintah & Sekolah menengah pertama yang terkait.
		Konteks kebijakan (the context of policy implementation).	Urgensi dan skema yang dibentuk pemerintah guna menerapkan kebijakan pendidikan ini. Bagaimana bentuk kriteria dari lembaga yang terkait dalam

		kebijakan pendidikan tersebut. Respon dari masyarakat sebagai penerima / target
--	--	---

Pada implementasi kebijakan, memiliki beberapa komponen yang menjadi penghambat, yang meliputi Sasaran dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik agen pelaksana, Disposisi, Komunikasi antar organisasi pelaksana, dan Lingkungan sosial, ekonomi, politik. Berikut faktor-faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan melalui Jalur Domisili di DKI Jakarta :

1. Sasaran & Tujuan Kebijakan

Kurangnya daya tampung yang menjadi masalah pada beberapa SMP di DKI Jakarta dan Masih terjadi permasalahan terkait dengan stigma masyarakat dalam pemahaman terkait dengan sekolah favorit & kurang favorit.

2. Sumber Daya

Beberapa oknum panitia SPMB masih ada yang kurang cepat tanggap dalam melayani masyarakat.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Ada beberapa agen pelaksana yang menjadi penghambat, karena ketidaktanggungjawaban oknum tersebut dengan tugasnya.

4. Disposisi

Pada disposisi, yang menjadi penghambat adalah masih ada beberapa

panitia yang suka terbawa emosi dalam memberikan pelayanan.

5. Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana

Kurangnya sosialisasi tentang alur pendaftaran SPMB dengan menggunakan jalur domisili di DKI Jakarta.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, Politik

Banyak masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya jalur domisili, karena sebagian dari mereka ada yang memiliki rumah satu domisili dengan sekolah yang dituju, namun kenyataannya tidak masuk juga ke dalam sekolah yang dituju dan Stigma sekolah unggulan / favorit akan selalu ada.

1.8 Argumen Penelitian

Berdasarkan pemaparan yang penulis sudah jabarkan bahwa dalam latar belakang dan juga melihat adanya keterkaitan antara rumusan masalah serta kerangka dasar pemikiran yang ada, maka dalam hal ini peneliti mengajukan argumen penelitian sebagai berikut :

1. Jalur domisili ini kurang efektif digunakan karena ada beberapa masalah yang hadir, masalah tersebut hadir dari pemerintah yang kurang baik.
2. Stigma bahwa adanya sekolah favorit & kurang favorit susah dihilangkan di masyarakat karena hal tersebut merupakan bentuk dari sebuah kesadaran dalam diri masyarakat masing-masing.
3. Pemerintah sebagai penyedia kebijakan pendidikan ini harus gencar dalam melaksanakan penyelesaian dalam mengatasi permasalahan di

bidang pendidikan ini.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan mengadopsi metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana kualitatif ialah uraian keseluruhan tentang pembahasan, maksud tujuan, & peran terkait dengan penerapan jalur domisili dalam kebijakan pendidikan tersebut dalam proses SPMB. Dalam metode deskriptif, fokus penelitian adalah untuk menggambarkan teliti karakteristik, sifat, atau keadaan dari subjek yang diteliti. Dengan kombinasi metode deskriptif dan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif. Tipe ini juga merupakan tipe yang sangat tepat dalam penelitian penerapan kebijakan pendidikan ini, karena tipe ini memiliki tujuan guna memecahkan, menghimpun, menata, & menjabarkan data yang diperoleh dalam penelitian.

1.9.2 Situs Penelitian

Pada penelitian ini, situs penelitian ini memiliki lokus di SMP - SMP negeri di DKI Jakarta, lalu fokus dalam penelitian ini mengenai bagaimana Implementasi Kebijakan Pendidikan dengan Jalur Domisili dalam proses SPMB di SMP - SMP Negeri di DKI Jakarta. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis, seperti keberagaman sosial ekonomi, geografi, atau kebutuhan pendidikan khusus di wilayah tersebut. Selain itu, Jakarta memiliki tantangan & karakteristik

yang unik, dimana peneliti tertarik untuk mengkaji kasus terkait dengan implementasi kebijakan domisili dalam proses SPMB. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai situasi dan konteks di wilayah tersebut.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek yang ada dalam penelitian ini ialah beberapa narasumber, narasumber adalah orang yang memiliki informasi lebih terkait dengan masalah yang sedang diteliti, lalu narasumber itu sendiri nantinya akan diminta penjelasan terkait dengan informasi yang diinginkan serta memberikan informasi yang mereka miliki. Maka dari itu, narasumber memiliki manfaat bagi peneliti, pasalnya dari hasil informasi yang didapatkan oleh peneliti melalui narasumber tersebut bisa terjadi sebuah proses *brainstorming* / bertukar pikiran terkait masalah yang sedang diteliti. Maka dari itu, narasumber yang hadir dalam penelitian ini, yakni Pemerintah yang membuat kebijakan tersebut, guru, unit sekolah, panitia SPMB di SMP DKI Jakarta, dan Orang tua murid.

1.9.4 Jenis Data

Data terkait dengan konteks penelitian ini mengacu pada sifat / atribut unik dari informasi yang dikumpulkan atau digunakan dalam penelitian ilmiah. Data yang berperan pendukung dalam memberikan jawaban dalam suatu penelitian yang ada, proses ini merupakan proses yang sangat penting. Metode kualitatif merupakan metode yang menjadi pilihan utama yang dipakai peneliti. Data kualitatif yang bersifat deskriptif dan tidak dapat diungkapkan dalam angka atau statistik,

menitikberatkan pada pemahaman yang lebih mendalam terhadap aspek kontekstual, persepsi, makna, dan interpretasi subjek.

Peneliti dalam tahapan ini melakukan pengumpulan berbagai data kualitatif melalui berbagai metode, seperti wawancara, analisis dokumen, & observasi. Data kualitatif ini kemudian akan dianalisis dengan menggunakan kerangka / pendekatan kualitatif tertentu yang telah ditentukan, seperti analisis isi, naratif, atau berdasarkan topik. Pendekatan ini akan menjadi panduan guna mensitesiskan data & mengungkap informasi lebih dalam terkait dengan berbagai isu implementasi kebijakan yang sedang diteliti. Dengan itu, penelitian ini menghasilkan pemahaman yang lebih luas tentang implementasi kebijakan pendidikan di DKI Jakarta, termasuk berbagai perspektif, hambatan, dan dampaknya terhadap pendidikan yang ada. Data kualitatif ini memungkinkan peneliti menjawab pertanyaan penelitian dalam konteks ini.

1.9.5 Sumber Data

Data pastinya diperlukan dalam suatu penelitian, pada hal ini, data yang didapatkan dalam proses penelitian ialah data Primer & Sekunder, dimana pada perolehan hal tersebut juga terdapat sumber, berikut penjelesannya terkait dengan sumber yang ada :

1. Data Primer

Data primer ini ialah sebuah data yang diperoleh melewati narasumber yang ada baik individu maupun kelompok, data primer pada penelitian ini

didapatkan lewat proses interview yang dilakukan oleh unit sekolah, guru, panitia SPMB, pemerintah yang membuat kebijakan tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder ini ialah data yang didapatkan dengan tidak langsung, contoh data sekunder dalam penelitian ini merupakan data SPMB pada tahun-tahun sebelumnya.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara & dokumen, metode wawancara yang dipakai ialah wawancara yang terstruktur, dokumentasi, serta observasi. Guna mendapatkan data tersebut, peneliti dalam penelitian ini melaksanakan penghimpunan data dengan terjun langsung ke SMP di DKI Jakarta khususnya SMPN 143 Jakarta, yang bertujuan guna melakukan proses penghimpunan data & menghimpun teori yang berkaitan dengan berbagai sumber yang ada. Selain wawancara, dalam proses penghimpunan data juga memakai teknik dokumen, teknik ini diterapkan menggunakan cara menghimpun data dari referensi yang didapatkan dari buku & sebagainya. Berikut penjelasan teknik-teknik yang digunakan dalam menghimpun data pada penelitian ini, diantaranya :

1. Wawancara (interview)

Teknik wawancara ialah teknik yang dilakukan guna menghimpun informasi dari individu / kelompok, dimana individu tersebut dikenal dengan nama narasumber. Interview dilakukan dengan 2 pihak, yakni

peneliti selaku interview & narasumber selaku interviewer.

2. Observasi

Observasi / pengamatan merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan dengan struktur yang baik & sudah terencana sebelumnya terkait dengan peristiwa sosial. Observasi, biasanya memiliki tujuan guna membaca terkait dengan konteks penelitian ini, apakah sudah efektif / belum.

3. Dokumentasi

Teknik yang terakhir ialah sebagai barang bukti dalam suatu peristiwa yang sudah dirasakan sebelumnya. Dokumen tersebut bisa diartikan dalam bentuk gambar, tulisan, & lain-lain. Teknik ini dapat menjelaskan & dijadikan sebagai barang bukti, karena didalamnya terdapat gambar & rekaman suara.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Berikut beberapa langkah guna menganalisis data yang dikemukakan oleh (Creswell & Susanto, 2013), yakni :

1. Mengampuhkan & mengartikan suatu data guna melakukan proses analisis.
Langkah ini menyangkut dengan hasil wawancara yang sudah dilakukan, yang dimana bermaksud untuk mengartikan materi, menulis data yang didapat pada saat terjun langsung, & mengolah data untuk dimasukkan dalam jenis-jenis data.
2. Memahami semua data yang didapatkan, dalam langkah ke-2 ini dimaksud dengan menulis rangkuman khusus dari data yang didapat.

3. Menganalisis lebih dalam melalui pengolahan data.
4. Menerapkan pengolahan data tersebut guna mengartikannya
5. Memperlihatkan hasil pengartian dalam pengolahan data tersebut untuk dijadikan sebuah laporan kualitatif.
6. Menafsirkan data

Pada langkah terakhir ini, penafsiran tersebut bertujuan guna mempresentasikan dalam bentuk kualitatif, agar nantinya data yang sudah dihimpun & dianalisis dapat dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

1.9.8 Kualitas Data

Kredibilitas dalam sebuah penelitian kualitatif banyak digunakan untuk memberikan validasi. Kredibilitas / keterpercayaan ialah sebuah komponen utama guna mempersoalkan terkait dengan kualitas dalam sebuah penelitian. Pada penelitian kualitatif ini sudah dapat dikatakan berkualitas / terpercaya apabila penelitian yang dilakukan sudah tepat dari perspektif peneliti & pembaca secara umum. Dalam melakukan validasi data pada penelitian kualitatif mencakup uji, *credibility, transferability, dependability, & confirmability* (Sugiyono, 2019).

1. *Credibility*

Tes yang pertama dalam menguji validitas data pada penelitian kualitatif adalah dengan melakukan uji *credibility* yang biasa dikenal dengan sebutan

validitas internal, uji *credibility* ialah suatu bentuk percaya pada data yang diperoleh dari hasil penelitian kualitatif. Uji yang pertama ini meliputi ekstensi observasi, tekun dalam melakukan penelitian, triangulasi, brainstorming dengan individu lain, analisis kasus negatif, & pengecekan member.

2. *Transferability*

Uji yang kedua adalah uji *transferability* yang biasa dikenal dengan sebutan validitas eksternal. *Transferability* ini memperlihatkan tingkatan dari diimplementasikannya hasil penelitian yang diperoleh terhadap komunitas dimana sampel tersebut diperoleh.

3. *Dependability*

Uji yang ketiga ini adalah *Dependability* atau yang biasa dikenal dengan nama reabilitas, dimana uji *Dependability* dapat diartikan bahwa penelitian merupakan bentuk kepercayaan yang dapat dianut. Pada uji yang ketiga ini dimaksud apapun diteliti dengan menggunakan prosedur penelitian yang sama, hasil akhir yang dihasilkan juga akan sama.

4. *Confirmability*

Uji yang terakhir adalah *confirmability* yang dimana biasa dikenal dengan obyektivitas. Penilaian penelitian objektif dikenal apabila banyak orang yang telah mendukung hasil penelitian tersebut. Pada uji *confirmability* ini dapat dikatakan sebagai tes hasil penelitian yang disangkutkan pada sebuah

proses yang sebelumnya sudah dilaksanakan, dengan itu dapat dikatakan juga bahwa penelitian adalah sebuah fungsi dari proses yang sebelumnya sudah dilaksanakan, dengan begitu penelitian sudah memenuhi standar.